

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

TEMA :

**TEKNIS PELAKSANAAN
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN MASYARAKAT PERBUKITAN
KARANGTENGAH DAN MASYARAKAT PANTAI KARANGSEWU PROVINSI DIY**



Ketua Tim :

1. Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa, SU

Anggota :

2. Dr. Rudi Dwi Maryanto, M.Pd.I

3. Evi Nilawati, S.Pd, MM

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
JAKARTA
DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

	Hal.
Pendahuluan.....	1
1. Latar belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi masalah.....	3
3. Rumusan masalah.....	4
4. Tujuan dan sasaran.....	4
5. Konsepsi berpikir.....	4
5.1.Pengembangan local.....	5
5.2.Perencanaan social.....	5
5.3.Aksi social.....	5
6. Kesimpulan.....	24
7. Daftar acuan.....	25
8. Ucapan Terima Kasih.....	26

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Model pembangunan daerah sebagaimana disampaikan dalam Undang-undang 32 tahun 2004, mengarahkan pembangunan berpagu pada sumberdaya alam yang tersedia. Pembahasan mengenai sumberdaya alam tentunya merupakan keterpaduan dari sumberdaya lahan, air, udara, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan lainnya. Pendekatan pembangunan dengan dasar pemberdayaan masyarakat menjadi trend setelah paradigma baru dalam pembangunan di Indonesia yang diawali tahun 1997.

Pelaksanaan pembangunan bidang ketransmigrasian, dalam konteks pembangunan di luar Jawa , maupun di pulau Jawa yang dimulai pada tahun 1997 dalam bentuk *resettlement* berjalan secara dinamik mengikuti perkembangan pembangunan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dimana untuk *resettlement* di pulau Jawa sampai saat ini sebanyak 99 wilayah yang tersebar di pula Jawa, dengan demikian menjadi daya ungkit lebih baik bagi para pelaksana di tingkat daerah untuk mendorong dinamika pembangunan pemerintah daerah, dimana kawasan *rettlement* tersebut di kembangkan. Mengacu pada pilar tujuan pembangunan daerah, kebijakan ketransmigrasian dikembangkan selaras dan harmonis dengan Dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum di wilayah resettlemnt serta masyarakat sekitarnya.

Konsep pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan mulai tampak ke permukaan sekitar tahun 1970 an.dan terus berkembang sepanjang dekade 1980 an hingga akhir abad ke 20. Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian dari aliran *post modernisme*. Konsep ini muncul akibat dari reaksi terhadap alam pikiran , tata masyarakat, dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (Hikmat,H, 2004), selanjutnya Rappaport (1987) menyatakan mengenai pemberdayaan sebagai suatu pemahaman psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang . Sementara Mc Ardle (1989), mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut, dengan demikian pemberdayaan

disimpulkan sebagai proses pemahaman psikologis individu ataupun kelompok yang dalam aktifitasnya perlu melaksanakan pengambilan keputusan dan secara konsekuen akan melaksanakan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan dilaksanakan secara sepakat serta melibatkan partisipasi seluruh elemen anggota kelompok yang ada. Dengan kata kunci Partisipasi, maka pemberdayaan akan lebih nyata dan realistis apabila seluruh anggota bergerak secara simultan dan dinamis, dengan demikian partisipasi merupakan komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat (Craig dan Mayo,1995)

Pemberdayaan dan partisipasi menjadi strategi yang potensial untuk pembangunan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pembangunan masyarakat pedesaan (*rural community development*), merupakan bagian integral dari pembangunan kawasan, dalam konteks regional pembangunan masyarakat merupakan strategy yang komprehensif dan multidisplin dalam menangani permasalahan pembangunan baik ditingkat desa maupun di perkotaan. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan dengan pendekatan agropolitan, merupakan upaya yang cukup gayut dalam pembangunan masyarakat yang mengacu pada partisipasi masyarakat, dengan adanya pusat pertumbuhan di setiap kecamatan (KSPP) memungkinkan adanya komoditas unggulan, dengan demikian akan menjadi kawasan sentra produksi (KSP), yang memiliki unggulan dalam mendukung PDRB daerah, dengan menggunakan daerah pedesaan sekitarnya sebagai *buffer zone* sehingga pengembangan kawasan regional merupakan pembangunan masyarakat yang terpadu, dengan dukungan seluruh sektor (PKT)

Pembangunan masyarakat dengan pemberdayaan pada setiap elemen masyarakat, memungkinkan kesiapan setiap elemen masyarakat untuk mandiri dalam perekonomian, sebagai bentuk keutuhan kelompok petani yang unggulan dalam melaksanakan kesiapan kemandirian komoditas, dengan dukungan ketahanan manajemen usahatani yang professional, dengan arahan meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses pembangunan masyarakat pedesaan dengan cara pemberdayaan dengan partisipasi masyarakat akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat, dengan *multiplier effect* menciptakan kemandirian masyarakat.

Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, menjadi salah satu *entry point*, yang paling menonjol perlu dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan, secara umum di tingkat masyarakat, serta khususnya di

kawasan *rettlement*. Mengacu pada Undang-undang Ketransmigrasian salah satu elemen pendukung peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat, melalui pelatihan yang tepat , untuk mencapai pelatihan yang tepat, diperlukan kejelian serta ketepatan dalam menyusun dan mendesain program pelatihan yang komprehensif, situasional serta kondisional (*local indegeous*) menjadi perhatian utama para perencana program dalam menyusun program yang implementatif dan berdaya guna bagi pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan.

2. Identifikasi masalah

Aplikasi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, disatu sisi masyarakat tidak mampu atau berdaya tanpa adanya bantuan pakar atau ahli dalam melaksanakan penyusunan, sampai pelaksanaan program yang telah dimusyawarahkan, Pengalaman empirik telah dibuktikan oleh para relawan yang tergabung dalam NGO pengambilan data pada kelompok masyarakat dilaksanakan dengan metode PRA ataupun RRA (Participation Rural Appraisal atau Rural Rapid Appraisal)

Kelambatan dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat *rettlement*, tidak bisa dilepaskan dari akar permasalahan lemahnya modal kerja masyarakat tani dan nelayan ataupun perkebunan, skill atau kerampilan masyarakat dalam ber usahatani masih bersifat sederhana dan konvensional, memperhatikan kendala tersebut tentunya partisipasi, mediasi dan fasilitasi pemerintah dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting .

Memperhatikan kondisi kawasan *rettlement* di pula Jawa beragam dari wilayah perbukitan sampai dataran pantai , maka dalam menyusun program pelatihan yang dilaksanakan dengan metode PRA diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mudah bagi para pelaku dan pelaksana di daerah . Permasalahan lemahnya modal kerja masyarakat tani dan nelayan ataupun perkebunan. Yang ke dua adalah skill atau kerampilan dalam ber usahatani masih bersifat sederhana dan konvensional, campur tangan pemerintah dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting sampai dua tiga tahun mendatang.

3. Rumusan masalah

Mengacu pada latar belakang masalah serta masalah utama, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah tingkat ketepatan kinerja pelatihan serta pembinaan institusi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah *rettlement* yang ada di pula Jawa.
2. Bagaimanakah metode penyusunan program yang tepat guna dan berdaya guna bagi kebutuhan masyarakat di kawasan *resettlement*.

4. Tujuan dan sasaran

1. Mengetahui model penyusunan program pelatihan yang tepat guna dan berdaya guna , dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di kawasan *resettlement*
2. Mengetahui implementasi program pelatihan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di kawasan *resettlement*

5. Konsepsi berpikir

Terdapat tiga rumusan model yang diberlakukan dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Jack Rothman (1974)dalam Hikmat (2003):

1. Pengembangan lokal

Model ini mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimulai tahap perencanaan, penentuan tujuan, dan implementasi. Strategi dasar yang diterapkan dalam memecahkan permasalahan , adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang menyeluruh dari seluruh warga masyarakat . Tema pokok dalam pengembangan lokal mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar sukarela, swadaya, dan tujuan utama untuk pendidikan. Metode yang dipergunakan adalah prosedur demokratis dengan musyawarah ataupun diskusi

2. Perencanaan sosial

Model ini berbeda dengan model terdahulu, pada model perencanaan social lebih menekankan pada pemecahan masalah secara teknis, pelaku pakar untuk menyelesaikan permasalahan menjadi kunci utama, peran masyarakat lebih sedikit

, akan tetapi untuk kondisi Indonesia perencanaan dengan mengandalkan partisipasi masyarakat penting untuk diperhatikan, karena ada kecenderungan kebijakan program pembangunan masyarakat kurang sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Strategi dasar yang dipergunakan untuk memecahkan masalah permasalahan adalah mengumpulkan atau mengungkap fakta atau data mengenai permasalahan, dilanjutkan analisis untuk penyusunan program. Metode yang dipergunakan adalah mengerahkan keahlian atau kepakaran dalam perencanaan, pengumpulan data dan informasi, serta analisis dalam penyusunan program.

3. Aksi sosial

Model ini menekankan pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah, dan sistematis. Model ini bertujuan untuk merubah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadapi. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah mengadakan usaha-usaha yang lebih terarah, terorganisir untuk mencapai target, sedang metode yang diterapkan adalah menggerakkan masyarakat untuk tindakan langsung, untuk memecahkan permasalahan

Dari ketiga model yang dimunculkan, menunjukkan bahwasanya model pertama partisipasi dalam pelaksanaan kikutsertaan masyarakat dalam perencanaan penyusunan program sampai ke implementasi cukup besar, sedangkan metode ke dua tidak mesti harus ikut serta, sedangkan model yang ketiga masyarakat sebagai obyek, sehingga keterlibatan dalam penyusunan perencanaan hampir tidak ada. Dalam aplikasi di lapangan khususnya di Indonesia gabungan model pertama dan kedua yang paling baik. Deskripsi model pemberdayaan masyarakat di dalam upaya pembangunan masyarakat, disajikan pada tabel 1. sebagai berikut

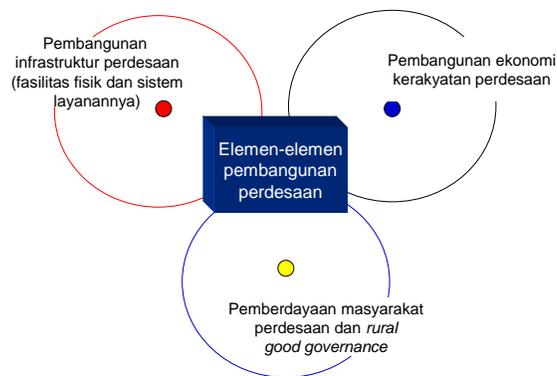
Tabel 1. Matriks Model Pemberdayaan Masyarakat

Model	Focus	Partisipasi	Tema	Metode	Strategi
Pemberdayaan lokal	Masyarakat,	Aktif	pembangunan masyarakat	pendekatan pada kelompok masyarakat dan pengambilan keputusan	Pengumpulan data ataupun fakta, penyusunan program sampai

				dilaksanakan secara musyawarah	pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan bersama oleh masyarakat
Perencanaan sosial	Masyarakat	Pasif, sampai aktif artinya penekanan utama adalah ketersediaan ahli atau pakar dalam pemecahan masalah	Pembangunan masyarakat	pendekatan pada kelompok masyarakat dan pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tim pakar	Pengumpulan data ataupun fakta sebagai basis data penyusunan program sampai pelaksanaan dan evaluasi mengutamakan adanya pakar
Aksi Sosial	Masyarakat	pasif	Pembangunan masyarakat	Menggerakkan masyarakat untuk langsung memecahkan masalah peran institusi pemerintah sangat besar	mengadakan usaha-usaha yang lebih terarah, terorganisir untuk mencapai-target

Sumber : Modifikasi dari Jack Rothman, 1974

Konsep pembangunan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat tersebut merupakan ide yang berkembang setelah masa reformasi di Indonesia, dengan berkembangnya demokratisasi setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, walaupun secara konsepsi metode ini sudah baik, tetapi implementasinya masih tetap dipengaruhi secara significant oleh government, gambaran pemberdayaan dalam konteks pembangunan di gambarkan sebagai berikut :



3

Sumber : Sunyoto Usman ,2008

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bertumpu pada modal dasar yang dimiliki masyarakat, dalam pelaksanaannya lemahnya modal dan teknologi menjadi kendala untuk pengembangan usaha mandiri. Campur tangan pemerintah dalam ketiga variabel menjadi sangat dominan, terdapat dua hal yang penting untuk dimengerti dalam pembangunan saat ini, peran pemerintah sebagai steering power dalam pembangunan dengan mendorong terciptanya variabel pembangunan ekonomi dalam masyarakat, merupakan bentuk gerakan pembangunan internal untuk membentuk *good governance*, pembangunan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah secara internal pada masyarakat dan eksternal di luar komunitas masyarakat, dengan ikatan tidak langsung mendukung konsepsi pembangunan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, dan pasar serta pemasaran bagi produk masyarakat.

Dengan banyaknya peran pemerintah dengan sistem *top down* sehingga masyarakat diharuskan mengikuti arahan dan pemikiran dari pemerintah, dengan demikian terjadi tidak sepenuhnya merupakan assesment masyarakat, dari sebab keberadaan petani ataupun masyarakat nelayan, masih dalam posisi yang selalu lemah dalam kemampuan, teknologi ataupun modal.

Walaupun secara konsepsional pemberdayaan yang ada saat ini sudah berjalan, akan tetapi pemerintah lebih bersifat mengarahkan, mulai dari perencanaan sampai pada implementasi. Dengan memperhatikan tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengarah pada :

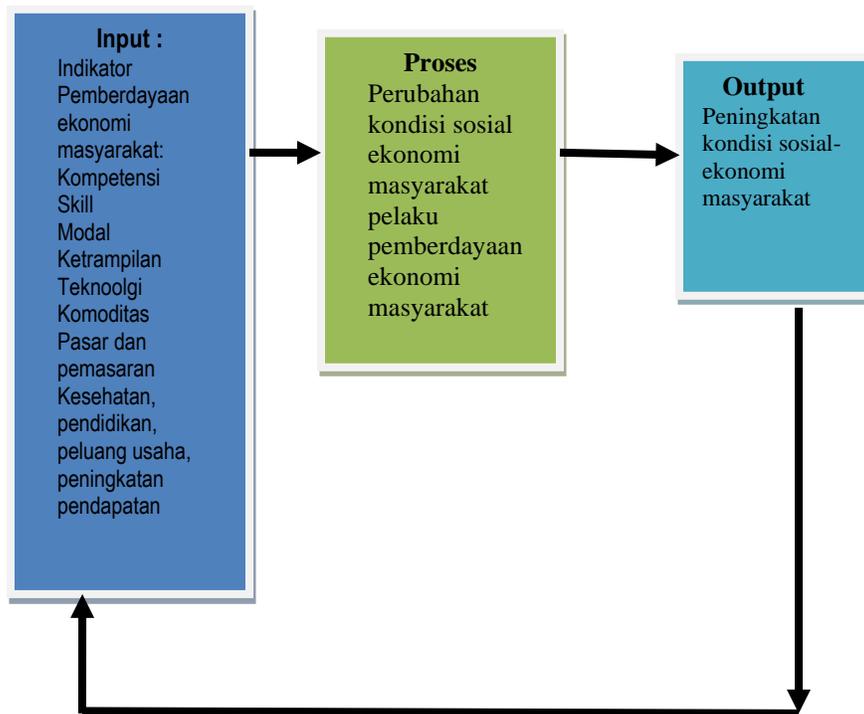
1. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan,
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang yang proposional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan sebagai upaya dalam rangka membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Aplikasi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, disatu sisi masyarakat tidak mampu atau berdaya tanpa adanya bantuan pakar atau ahli dalam melaksanakan penyusunan, sampai pelaksanaan program yang telah dimusyawarahkan. Pendekatan yang dipergunakan dalam analisis PRA bagi daerah pedesaan ataupun perkotaan dilaksanakan dengan analisis GMP (Gawat, Mendesak, dan

penyubarannya), dimana analisis GMP ini memiliki beberapa tahapan sebagai berikut (Agus Djoko, 1996)

1. Identifikasi permasalahan dari kelompok sasaran (masyarakat)
2. Uji Prioritas masalah diurutkan sesuai skala prioritas
3. Uji pemerataan antar masalah terpilih
4. Hubungan masalah relevan dengan potensi desa/ masyarakat (dana, SDM, dan SDA)
5. Rencana Tindak lanjut, berisikan rancangan dan penyusunan program sesuai kebutuhan kelompok sasaran (masyarakat)

Tahapan ini akan berkaitan dengan ruang, waktu, aliran, dan keputusan. Ruang menjawab apa, dan dimana, Waktu menjawab kapan, Aliran menjawab bagaimana, dan keputusan menjawab mengapa program diusulkan dan siapa yang akan memperoleh benefit (manfaat). Kelengkapan dari desain pelatihan , maka perlu dilaksanakan evaluasi teknis, maupun administratif atas kegiatan pemberdayaan dalam tataran implementasi. Dengan demikian secara sistematis kerangka berpikir untuk kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat disajikan sebagai berikut



Gambar.1.1. Kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat

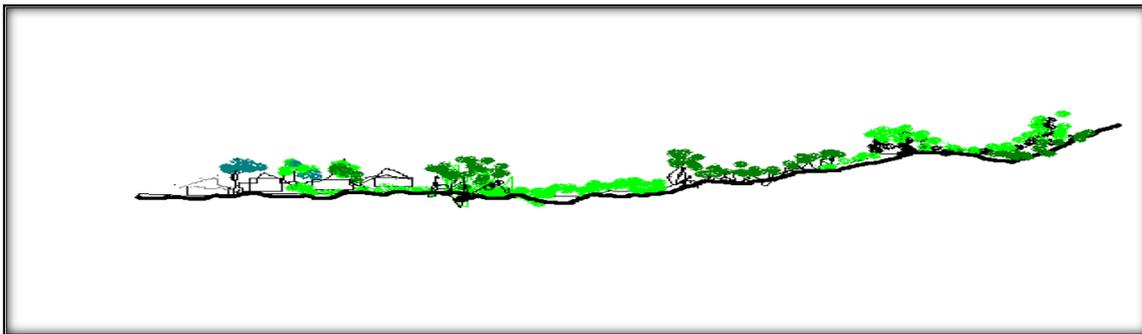
BAB II. KERAGAAAN WILAYAH KAJIAN PEMBERDAYAAN

Pengenalan penyusunan program pelatihan untuk wilayah *resettlement* di kelompokkan menjadi dua contoh kasus (pada wilayah perbukitan dan wilayah pantai) di dusun karangtengah kecamatan Imogiri. merupakan *resttlement* yang ada di wilayah perbukitan Bantul Provinsi DIY, wilayah *resettlement* Karangsewu kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, dimana pada saat ini telah ditempati 100 KK untuk wilayah *resettlement* Karangtengah dan 50 KK untuk wilayah *resttlement* Karangsewu.

2.1. Metode penyusunan Program pelatihan untuk Wilayah Perbukitan

a. Identifikasi masalah real lapangan

Pada awal penyusunan program pembangunan masyarakat dilaksanakan pengenalan masalah. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan pertanian maka pendekatan agroekosistem menjadi dasar untuk menyusun unit analisis. Dari keberadaan kawasan dusun Karangtengah disusun agroekosistem sebagaimana gambar.1



Gambar. 1. Transek gambaran keadaan Karangtengah

Landuse	Pemukiman	Tegalan/sawah	Sawah	Kebun/ladang	ladang
---------	-----------	---------------	-------	--------------	--------

Vegetasi	Rumah dan pekarangan	Padi sawah/palawija	Padi ladang	Empon-empon Mahoni Nangka Sirsak Jambu mete	Empon-empon Mahoni Nangka Sirsak Jambu mete
Status lahan	Sultan groumd	Sultan groumd	Sultan groumd	Sultan groumd	Sultan groumd
Jenis tanah	Latosol/litosol	Latosol/grumosol	Regusol/grumosol	Latosol/litosol	Latosol/litosol
Kesuburan	Rendah	Rendah	Sedang-rendah	Rendah	rendah
Masalah	1.Air tanah 2.Kesuburan tanah 3.Hama 4.Produksi rendah 5.Gizi keluarga rendah 6.Pendidikan 7.Kesehatan rendah	Kesuburan Hama Produksi rendah Hama teknologi	Kesuburan Produksi rendah Hama teknologi	Kesuburan Produksi rendah Hama teknologi	Kesuburan Produksi rendah Hama teknologi

Sumber: FGD,2022

Informasi sumberdaya disini berupa sumberdaya yang dapat dimanfaatkan petani atau masyarakat, dalam mengelola lahan yang dimiliki. Dengan menggunakan PRA diharapkan dapat menggali potensi tenaga kerja, modal, penghasilan, status kepemilikan lahan, masalah serta kendala lain yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang muncul diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat kesuburan tanah

Beberapa petani berpendapat bahwa tingkat kesuburan tanah di desanya sangat rendah, sehingga tanaman tahunan, tanaman semusim memiliki tingkat produksi yang rendah, peningkatan diharapkan terjadi apabila ditambahkan pupuk organik dari yang semula 2 ton per hektar menjadi 3 ton per hektar, baik untuk tanaman semusim maupun tahunan., masukan input organik diharapkan lebih baik dibandingkan anorganik.

2. Erosi dan degradasi lahan

Hampir sebagian besar petani menyampaikan bahwa menurunnya tingkat kesuburan pada daerah perbukitan, dikarenakan adanya erosi dan degradasi lahan yang sangat kuat , faktor pendorong yang kuat terjadinya erosi dan degradasi lahan karena minimnya konservasi, maupun preservasi

3. Diversifikasi lahan

Pendapat masyarakat untuk menutup kebutuhan petani dengan memanfaatkan lahan yang tersedia seoptimal mungkin, dengan cara intensifikasi usahatani, baik di lahan pekarangan maupun di lahan sawah., diharapkan diversifikasi pada *on farm*, *outfarm*, maupun *off farm* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Produksi rendah

Rendahnya produksi hasil usahatani , berkaitan erat dengan faktor utama kesuburan tanah, teknologi dimiliki, dan cara pengelolaan petani yang kurang baik

b,c. Prioritas masalah dan pemerataan masalah

Dari uraian permasalahan tersebut, kemudian disusun matriks hubungan antara permasalahan dengan skore (menggunakan skala rating) sebagaimana disajikan pada tabel.2.1

Tabel.2.1. Uji Prioritas permasalahan di lokasi kajian Karangtengah

No	Masalah	skore			Jumlah
		Gawat	Mendesak	Distribusi	
1	Kesuburan tanah rendah	0	3	2	5
2	Produksi rendah	5	3	2	10
3	Erosi dan degradasi lahan	5	3	2	10
4	Diversifikasi tanaman	0	3	2	5

Sumber : FGD, 2022

Keterangan :

Angka 5 = berarti gawat

Angka 3 = berarti mendesak

Angka 2 = berarti distribusi merata

Matriks menunjukan masalah utama yang memperoleh prioritas ditangani adalah Produksi rendah, sebagai akibat oleh kesuburan tanah yang rendah dan merata tersebar di seluruh kawasan, diikuti oleh kerusakan lahan pada daerah perbukitan karena erosi ataupun degradasi lahan, yang hampir merata di seluruh kawasan bagian selatan, kesuburan tanah merata di seluruh kawasan dan diversifikasi tanaman yang dapat diselenggarakan merata baik di lahan pekarangan maupun persawahan.

d. Hubungan masalah

Intensitas hubungan antar masalah, kemudian disajikan dalam format tabel.2,2 sebagai berikut .

Tabel.2.2. Intensitas hubungan antar masalah

Masalah	Kesuburan tanah	Produksi rendah	Erosi dan degradasi lahan	Diversifikasi tanaman
Produksi rendah	++	+	+	-
Kesuburan tanah	+	++	+	+
Erosi dan degradasi lahan	+	+	+	0
Diversifikasi tanaman	+	++	+	+

Keterangan:

- + = significant antar masalah
- ++ = sangat significant antar masalah
- = tidak significant antar masalah
- = sangat tidak significant antar masalah
- 0 = tidak ada hubungan antar masalah

Dari tabel.2.2. nampak bahwa masalah utama dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Karangtengah adalah :

- 1.Peringkat 1 = produksi rendah
- 2.Peringkat 2 = kesuburan tanah rendah
- 3.Peringkat 3 = Erosi dan degradasi lahan
- 4.Peringkat 4 = Diversifikasi tanaman

Langkah penetapan prioritas selanjutnya diturunkan dengan menyusun topic dan sub topik yang direncanakan menjadi usulan masalah yang perlu ditindak lanjuti , sebagaimana disajikan pada tabel.2.3.

Tabel.2.3. Topik dan Sub Topik usulan program

Aspek	TOPIK	SUB TOPIK
Sumberdaya lahan	1. Produksi Rendah	1.1. Kesuburan tanah rendah 1.2. Erosi dan degradasi lahan 1.3. Teknologi konvensional
	2. Kesuburan tanah rendah	2.1. Kurang unsur hara tanah 2.2. Pupuk dan pestisida organik

	3. Erosi dan degradasi	3.1. Konservasi tanah dan air 3.2. Rehabilitasi lahan
	4. Diversifikasi	4.1. Multicropping 4.2. Integrated farming 4.3 . Biocyclofarming 4.3. Peternakan

Sumberdaya manusia	1. Pendidikan	1.1. PAUD 1.2. APS dan APK 1.3. kejar Paket
	2. Kesehatan	2.1. Kader kesehatan 2.2. Kualitas air 2.3. Pengelolaan dan pengolahan limbah 2.4. Kesehatan lingkungan 2.5. Kesehatan Masyarakat
	3. Ekonomi	3.1. Ekonomi rumah tangga 3.2. Kewirausahaan 3.3. pasar dan pemasaran 3.4. Pengolahan hasil 3.5. kelembagaan 3.6. pendampingan 3.7. industri rumah tangga 3.8. Jasa pertukangan dan montir

Sumber : FGD,2022

e. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut, merupakan usulan program yang disusun secara partisipatif masyarakat, dipandu oleh tim disusun dalam konteks Apa, Mengapa, Dimana, Oleh siapa, dan berapa , selanjutnya secara implementatif disusun pada table.2.4a dan 2.4.b berikut

Tabel.2.4.a. Usulan Program

Aspek	Masalah	Usulan Program	Usulan pelatihan	Benefit	Pelaku
SDL	Produksi Rendah	Peningkatan kesuburan tanah	1. Pembuatan pupuk organik 2. Pembuatan pestisida organik	1. Kesuburan tanah meningkat 2. Usaha Pertanian meningkat	Petani didampingi Pembina
		Pengurangan Erosi dan degradasi lahan	1. Konservasi sumberdaya lahan dan air 2. Pembuatan teras 3. Pembuatan chekdam 4. Rehabilitasi lahan	SDL dan SD Air terjaga keberlanjutannya	Petani didampingi Pembina
		Peningkatan Teknologi pengolahan lahan Dan produksi	1. Penggunaan Alsintan 2. Pengolahan hasil	Peningkatan usahatani	Petani didampingi Pembina
		Pemanfaatan Diversifikasi usahatani	1. Penanaman multicropping 2. Integrated farming 3. Biocylo Farming 4. Peternakan 5. Perikanan 6. Intensifikasi lahan 7. Pemberdayaan lahan pekarangan 8. Pengendalian hama	Peningkatan usahatani	Petani didampingi Pembina

SDM	Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1. PAUD 2. APS dan APK 3. kejar Paket	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1. Kader kesehatan 2. Kualitas air 3. Pengelolaan dan pengolahan limbah 4. Kesehatan lingkungan 5. Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Dinas kesehatan Dinas tenaga Kerja Transmigrasi
	. Ekonomi	Peningkatan pendapatan masyarakat	1. Ekonomi rumah tangga 2. Kewirausahaan 3. pasar dan pemasaran 4. Pengolahan hasil 5. kelembagaan 6. pendampingan 7. industri rumah tangga 8. Jasa pertukangan dan montir	Peningkatan kualitas pendapatan masyarakat	Dinas Perindustrian Dinas tenaga Kerja Transmigrasi Dinas Koperasi

Rencana tindak lanjut yang merupakan rincian kebutuhan masyarakat di dusun Karangtengah, Imogiri disajikan dalam bentuk Tabel.2.4 b. sebagai berikut .

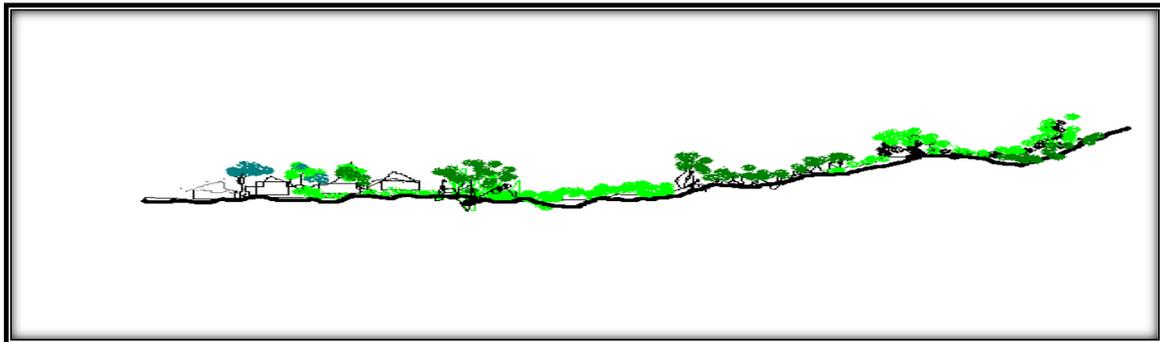
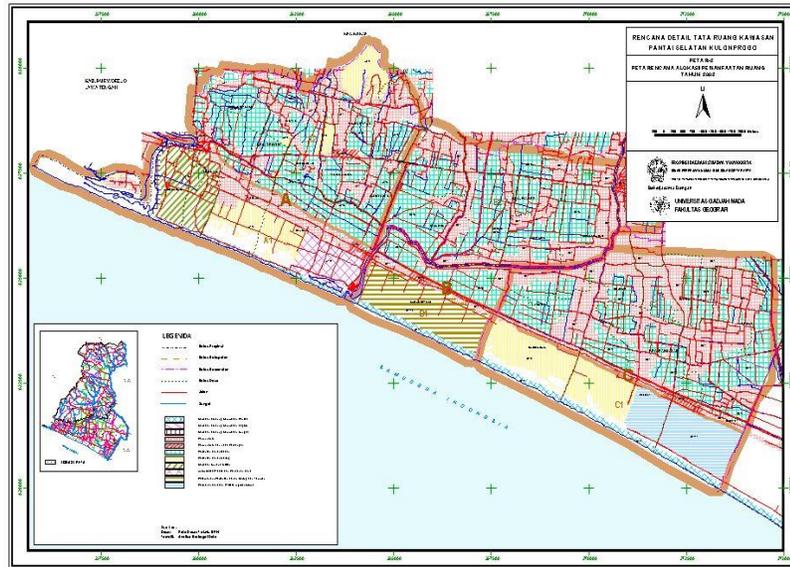
Tabel.2.4.b. Usulan Pembangunan Masyarakat di dusun Karangtengah, Imogiri

No usulan program	Apa yang diusulkan	Mengapa diusulkan	Dimana dilaksanakan	Kapan dilaksanakan	Siapa pelaksana	Bermanfaat untuk siapa	Bagaimana dilaksanakan
Peningkatan Kompetensi petani	Pelatihan : 1. Pembuatan pupuk organik 2. Pembuatan pestisida organik 3. Konservasi sumberdaya lahan dan air 4. Pembuatan teras 5. Pembuatan chekdam 6. Rehabilitasi lahan 7. Penggunaan Alsintan 8. Pengolahan hasil 9. Penanaman multicropping 10. Integrated farming 11. Biocylo Farming	Untuk usaha meningkatkan kompetensi serta pendapatan petani	Dusun Karangtengah	2022	Din.Pertanian Din Perhutanan Balai Besar Ketransmigrasian Dinas tenaga kerja transmigrasi Din.Indag Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan	Petani/masyarakat	Dana APBD

	12. Peternakan 13. Perikanan 14. Intensifikasi lahan 15. Pemberdayaan lahan pekarangan 16. Pemberantasan hama terpadu 17. PAUD 18. APS dan APK 19. kejar Paket 20. Kader kesehatan 21. Kualitas air 22. Pengelolaan dan pengolahan limbah 23. .Kesehatan lingkungan 24. .Kesehatan Masyarakat 25. Ekonomi rumah tangga 26. Kewirausahaan 27. pasar dan pemasaran 28. Pengolahan hasil 29. kelembagaan 30. pendampingan 31. industri rumah tangga 32. Jasa pertukangan dan montir						
--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Metode penyusunan Program pelatihan untuk Wilayah Pantai

Karangsewu merupakan wilayah *resettlement*, terletak di kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo, Kawasan resettlement di Karangsewu, dipersiapkan pada tahun 2007 untuk menampung relokasi masyarakat yang terkena bencana alam di wilayah utara Kabupaten Kulonprogo, meliputi kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Kokap, Girimulyo, Pengasih, dan Nanggulan. Dari keberadaan kawasan dusun Karangsewu disusun agroekosistem sebagaimana gambar.2



Gambar.2.. Transek lokasi *resettlement* Karangsewu

a. Identifikasi masalah real lapangan

Seperti halnya proses penyusunan program pelatihan di wilayah perbukitan, untuk wilayah pantai , dilaksanakan pengenalan masalah. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan pertanian dan perikanan maka pendekatan agroekosistem menjadi dasar untuk menyusun unit analisis. Dari keberadaan kawasan dusun Karangsewu disusun agroekosistem sebagaimana tabel.2.5.

Tabel.2.5 Identifikasi masalah

Landuse	Pemukiman	Kebun/ladang
Vegetasi	Rumah dan pekarangan	Hortikulture
Status lahan	Kadipaten Pakualaman	Kadipaten Pakualaman
Jenis tanah	Regusol eutrik	Regusol eutrik
Kesuburan	Rendah	Rendah
Masalah	Air tanah Kesuburan tanah Hama Produksi rendah Gizi keluarga rendah Pendidikan Kesehatan rendah Penangkapan dilaksanakan efektif 4 bulan dalam satu tahun	Kesuburan Produksi rendah Hama teknologi

Informasi sumberdaya disini berupa sumberdaya yang dapat dimanfaatkan petani atau masyarakat, dalam mengelola lahan yang dimiliki. Dengan menggunakan PRA diharapkan dapat menggali potensi tenaga kerja, modal, penghasilan, status kepemilikan lahan, masalah serta kendala lain yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai berikut :

1. Tingkat kesuburan tanah

Beberapa petani berpendapat bahwa tingkat kesuburan tanah di lahan usaha maupun lahan pekarangan relative rendah- sangat rendah, sehingga tanaman tahunan, tanaman semusim memiliki tingkat produksi yang rendah, peningkatan diharapkan terjadi apabila ditambahkan pupuk organik dari yang semula 2 ton per hektar menjadi 4 ton per hektar, baik untuk tanaman semusim masukan input organic diharapkan lebih baik dibandingkan anorganik.

2. Diversifikasi lahan

Pendapat masyarakat untuk menutup kebutuhan petani nelayan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia seoptimal mungkin, dengan cara intensifikasi usahatani, baik di lahan pekarangan maupun di lahan sawah/tegalan , diharapkan diversifikasi pada *on farm*, *outfarm*, maupun *off farm* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Produksi rendah

Rendahnya produksi hasil usahatani, berkaitan erat dengan faktor utama kesuburan tanah, teknologi dimiliki, dan cara pengelolaan petani yang kurang baik

b,c. Prioritas masalah dan pemerataan masalah

Dari uraian permasalahan tersebut, kemudian disusun matriks hubungan antara permasalahan dengan skor (menggunakan skala rating) sebagaimana disajikan pada tabel.2.6

Tabel.2.6. Uji Prioritas permasalahan di lokasi resettlement Karangsewu

No	Masalah	skore			Jumlah
		Gawat	Mendesak	Distribusi	
12	Air tanah		3	2	5
2	Kesuburan tanah	5	3	2	10
3	Hama		3	2	5
4	Teknologi usahatani		3	2	5
5	Produksi rendah	5	3	2	10
6	Gizi keluarga rendah		3	2	5
7	Pendidikan		3	2	5
8	Kesehatan rendah		3	2	5
9	Penangkapan ikan dilaksanakan efektif 4 bulan dalam satu tahun	5	3	2	10

Sumber : FGD, 2022

Keterangan :

Angka 5 = berarti gawat

Angka 3 = berarti mendesak

Angka 2 = berarti distribusi merata

Matriks menunjukkan masalah utama yang memperoleh prioritas ditangani adalah Produksi rendah, sebagai akibat oleh kesuburan tanah yang rendah dan merata tersebar di seluruh kawasan, penangkapan ikan dilaksanakan dalam setahun terbatas 4 bulan sehingga menjadi kendala besar dalam kesejahteraan masyarakat, yang berdampak pada kesehatan dan pendidikan masyarakat yang kurang diperhatikan, akibat nyata kawasan tersebut memiliki IPM yang ada dibawah rata-rata.

d. Hubungan masalah

Intensitas hubungan antar masalah, kemudian disajikan dalam format tabel.8 sebagai berikut.

Tabel.2.7. Intensitas hubungan antar masalah

	Air tanah	Kesuburan tanah	Hama	Teknologi usahatani	Produksi rendah	Diversifikasi tanaman	Gizi keluarga rendah	Pendidikan	Kesehatan rendah	Penangkapan ikan
Air tanah	++	+	0	+	+	+	0	0	0	0
Kesuburan tanah	+	++	+	+	+	+	0	0	0	0
Hama	0	0	++	+	+	+	0	0	0	0
Teknologi usahatani	+	+	+	++	+	+	0	0	0	0
Produksi rendah	+	+	+	+	++	+	+	0	0	0
Diversifikasi tanaman	0	+	+	+	+	++	+	0	0	0
Gizi keluarga rendah	0	0	0	0	+	+	++	+	+	+
Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	++	+	+
Kesehatan rendah	0	0	0	0	0	0	+	+	++	
Penangkapan ikan	0	0	0	0	0	0	+	+	+	++
	4	6	6	7	8	8	6	5	5	4

Sumber : FGD 2022

Keterangan:

- + = *significant* antar masalah
- ++ = sangat *significant* antar masalah
- = tidak *significant* antar masalah
- = sangat tidak *significant* antar masalah
- 0 = tidak ada hubungan antar masalah

Dari tabel.2.7. nampak bahwa masalah utama dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Karangsewu adalah adalah :

- 5.Peringkat 1 = Diversifikasi tanaman
- 6.Peringkat 2 = Produksi rendah
- 7.Peringkat 3 = Teknologi usahatani
- 8.Peringkat 4 = Kesuburan tanah dan hama

Langkah penetapan prioritas selanjutnya diturunkan dengan menyusun topic dan sub topik yang direncanakan menjadi usulan masalah yang perlu ditindak lanjuti , sebagaimana disajikan pada tabel.2.8

Tabel.2.8. Topik dan Sub Topik usulan program

Aspek	TOPIK	SUB TOPIK
Sumberdaya lahan	Diversifikasi usahatani	Integrated farming BCF Peternakan
	Produksi rendah	Kesuburan tanah rendah Teknologi
	Teknologi usahatani	Alsintan Pengolahan hasil
Sumberdaya manusia	Pendidikan	PAUD APS dan APK kejar Paket
	Kesehatan	Kader kesehatan Kualitas air Pengelolaan dan pengolahan limbah Kesehatan lingkungan Kesehatan Masyarakat Kader Gizi
	Ekonomi	Ekonomi rumah tangga Kewirausahaan pasar dan pemasaran Pengolahan hasil kelembagaan pendampingan industri rumah tangga Jasa pertukangan dan montir
	Perikanan	Alat tangkap Mekanik motor tempel

Sumber : FGD,2022

Tabel.2.9. Intensitas hubungan antar masalah

	Air tanah	Kesuburan tanah	Hama	Teknologi usahatani	Produksi rendah	Diversifikasi tanaman	Gizi keluarga rendah	Pendidikan	Kesehatan rendah	Penangkapan ikan
Air tanah	++	+	0	+	+	+	0	0	0	0
Kesuburan tanah	+	++	+	+	+	+	0	0	0	0
Hama	0	0	++	+	+	+	0	0	0	0
Teknologi usahatani	+	+	+	++	+	+	0	0	0	0
Produksi rendah	+	+	+	+	++	+	+	0	0	0
Diversifikasi tanaman	0	+	+	+	+	++	+	0	0	0
Gizi keluarga rendah	0	0	0	0	+	+	++	+	+	+
Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	++	+	+
Kesehatan rendah	0	0	0	0	0	0	+	+	++	
Penangkapan ikan	0	0	0	0	0	0	+	+	+	++
	4	6	6	7	8	8	6	5	5	4

Keterangan:

+ = *significant* antar masalah

++ = sangat *significant* antar masalah

- = tidak *significant* antar masalah

- - = sangat tidak *significant* antar masalah

0 = tidak ada hubungan antar masalah

e. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut, merupakan usulan program yang disusun secara partisipatif masyarakat, dipandu oleh tim disusun dalam konteks Apa, Mengapa, Dimana, Oleh siapa, dan berapa , selanjutnya secara implementatif disusun pada table.2.10.a dan 2.10.B

Tabel.2.10.a. Usulan Program

Aspek	Masalah	Usulan Program	Usulan pelatihan	Benefit	Pelaku
SDL	Pemanfaatan Diversifikasi usahatani	Peningkatan usahatani	1. Integrated farming 2. BCF 3. Peternakan	Peningkatan usahatani	Petani didampingi Pembina
	Produksi Rendah	Peningkatan kesuburan tanah	1. Pembuatan pupuk organik 2. Pembuatan pestisida organik	Kesuburan tanah meningkat Usaha Pertanian meningkat	Petani didampingi Pembina
	Teknologi usahatani	Peningkatan Teknologi pengolahan lahan dan produksi	1. Penggunaan Alsintan 2. Pengolahan hasil	Peningkatan usahatani	Petani didampingi Pembina
SDM	Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1. PAUD 2. APS dan APK 3. kejar Paket	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1. Kader kesehatan 2. Kualitas air 3. Pengelolaan dan pengolahan limbah 4. Kesehatan lingkungan 5. Kesehatan Masyarakat 6. kader Gizi	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Dinas kesehatan Dinas tenaga Kerja Transmigrasi
	. Ekonomi	Peningkatan pendapatan masyarakat	1. Ekonomi rumah tangga 2. Kewirausahaan 3. pasar dan pemasaran 4. Pengolahan hasil 5. kelembagaan 6. pendampingan industri rumah tangga	Peningkatan kualitas pendapatan masyarakat	Dinas Perindustrian Dinas tenaga Kerja Transmigrasi Dinas Koperasi

			8. Jasa pertukangan dan montir		
	Perikanan	Peningkatan pendapatan	1. alat tangkap 2. Mekanik motor tempel	Peningkatan kualitas pendapatan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Balai Besar Dinas Perikanan

Sumber : FGD,2022

Rencana tindak lanjut yang merupakan rincian kebutuhan masyarakat di dusun Karangsewu, disajikan dalam bentuk Tabel.2.10.b. sebagai berikut .

Tabel.2.10.b. Usulan Program Pelatihan untuk dusun Karangsewu (wilayah pantai)

No usulan program	Apa yang diusulk	Mengapa diusulkan	Dimana dilaksanakan	Kapan dilaksanakan	Siapa pelaksana	Bermanfaat untuk siapa	Bagaimana dilaksanakan
Peningkatan Kompetensi petani/nelayan	Pelatihan : 1. Integrated farming 2. BCF 3. Peternakan 4. Pembuatan pupuk organik 5. Pembuatan pestisida organik 6. Penggunaan Alsintan 7. Pengolahan hasil 8. PAUD 9. APS dan APK 10. kejar Paket 11. Kader kesehatan 12. Kualitas air 13. Pengelolaan dan pengolahan limbah 14. .Kesehatan lingkungan 15. .Kesehatan Masyarakat 16. kader Gizi 17. Kader kesehatan 18. Kualitas air 19. Pengelolaan dan pengolahan limbah 20. .Kesehatan lingkungan 21. .Kesehatan Masyarakat 22. kader Gizi 23. Ekonomi rumah tangga 24. Kewirausahaan 25. pasar dan pemasaran 26. Pengolahan hasil 27. kelembagaan 28. pendampingan 29. industri rumah tangga 30. Jasa pertukangan dan montir 31. Alat tangkap 32. Mekanik motor tempel	Untuk usaha meningkatkan kompetensi serta pendapatan petani	Dusun Karangsewu	2022	Din.Pertanian Din Perhutanan Balai Besar Ketransmigrasian Dinas tenaga kerja transmigrasi Din.Indag Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan	Petani/masyarakat	Dana APBD

6. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah :

1. Pembangunan masyarakat pada era Otonomi daerah , mengandalkan kekuatan daerah yang diindikasikan dengan sumberdaya tersedia meliputi sumberdaya alam, buatan dan manusia.
2. Model dikenali ada tiga yaitu Pemberdayaan lokal , perencanaan sosial, dan aksi sosial., dalam implementasi lapangan khususnya Karangtengah dan Karangsewu, dimana ke duanya mewakili wilayah perbukitan, dan wilayah pantai, merupakan mixed antara pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan social dipergunakan dalam menjaring *Needs Assesment* masyarakat.
3. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam penyusunan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga dalam implementasinya akan berdaya guna dan tepat guna.

7. Daftar acuan

Agus djoko Santosa, 1996. Analisis Kebutuhan Pelatihan suatu Pendekatan partisipatif, Puslatrans, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Jakarta

Agus Djoko Santosa, 2000, Pemberdayaan kawasan Transmigrasi ring I Karangtengah imogiri yogyakarta, dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Proponsi DIy, Yogyakarta

Agus Djoko Santosa, 2003. Pembangunan ekonomi rakyat dengan SLPHT , dinas Perkebunan Propinsi DIY, Yogyakarta

Craig G dan M. Mayo,1995, Community Empwermnt a reader in Participation and Development , London, Zed Books

Hikmat,H, 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora, Bandung

Mc Ardle , 1989,Community Development Tools and trade Community Quartely Journal, vol.16

Mikkelsen, B,2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya –upaya Pemberdayaan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Rappaport ,1987.Term of Empowerment Toward a Theory for community Psychology, American Journal of Community Psychology, vol 15 No.2

8. Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih kepada Masyarakat Bantul Yogyakarta, di wilayah perbukitan Bantul Provinsi DIY, wilayah *resettlement* Karangsewu kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPI Y.A.I, Fakultas Psikologi UPI Y.A.I, Fakultas Ilmu Komunikasi UPI YAI.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Sekretariat: Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Telepon : 021-3926000, Ext. 6902 / 2581

Website: <http://p3mupi.yai.ac.id> Email : lppm@upi-yai.ac.id

SURAT TUGAS

No. 203/LPPM UPI Y.A.I/XII/2022

Memperhatikan : Program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Persada Indonesia Y.A.I dimana salah satu program kegiatan Dosen UPI Y.A.I Pengabdian Kepada Masyarakat.

Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ini memberikan tugas kepada :

DOSEN UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

NAMA	KETERANGAN
Prof. Dr.Ir. Agus Djoko Santosa, SU	Fakultas Psikologi
Dr. Rudi Dwi Maryanto, M.Pd.I	Fakultas Psikologi
Evi Nilawati, S.Pd, MM	Fakultas Ilmu Komunikasi

Untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang direncanakan pada :

Bulan : Desember 2023

Tempat : Bantul Yogyakarta, di wilayah perbukitan Bantul Provinsi DIY, wilayah *resettlement* Karangsewu kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo

Tema : TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN MASYARAKAT PERBUKITAN KARANGTENGAH DAN MASYARAKAT PANTAI KARANGSEWU PROVINSI DIY

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Desember 2022

Direktur LPPM Universitas Persada Indonesia Y.A.I

(Dr. Sularso Budilaksono, MKom)

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Psikologi UPI Y.A.I
3. Dekan Fikom UPI Y.A.I
4. Yang bersangkutan